

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Adopsi inovasi teknologi secara universal dianggap sebagai alat penting dalam meningkatkan pelayanan dalam lingkup pemerintahan. Biasanya diterima hari ini bahwa inovasi teknologi memiliki pengaruh signifikan terhadap produktivitas pemerintah. Efek ini hanya akan terwujud sepenuhnya jika, dan kapan, inovasi teknologi tersebar luas dan digunakan. Oleh karena itu, penting untuk memahami faktor-faktor penentu adopsi inovasi teknologi dan model teoritis yang telah muncul dalam menanggapi adopsi inovasi teknologi. E-government telah diadopsi oleh berbagai level pemerintahan baik di negara berkembang atau maju namun belum menunjukkan hasil yang diharapkan. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan anggaran yang tidak sedikit untuk e-government tapi masih belum dibarengi dengan keberhasilan penerapannya. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Asman Abnur, mengakui bahwa tingginya belanja anggaran teknologi informasi dan komunikasi (TIK) pemerintah yang telah mencapai nilai Rp.16,76 T selama kurun waktu 2014-2017 (Wardani, 2016).

E-government dapat didefinisikan sebagai pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dan internet yang mempunyai kemampuan untuk mentransformasi hubungan dengan warga negara, para pebisnis, dan lembaga pemerintah yang lain. Di zaman yang serba digital saat ini teknologi sudah menjadi kebutuhan hampir disetiap sendi kehidupan manusia, untuk

mempermudah interaksi satu dengan yang lain baik sektor swasta maupun pemerintah. Untuk itu perlu dikembangkan e-government khususnya di organisasi pemerintah untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat dan sektor swasta untuk mengakses layanan pemerintah dengan layanan yang terintegrasi, efektif dan efisien di mana saja, kapan saja dan dalam bentuk yang nyaman melalui penggunaan internet dan saluran lain seperti ponsel, dan lain sebagainya. (Nugroho, 2016).

Namun, Indonesia dinilai masih tertinggal dibandingkan negara lain di kawasan Asia Tenggara dalam penerapan e-government. Pada tahun 2016 Indonesia berada pada peringkat 116 hasil survei *EDGI (E-Government Development Index)*, hal ini turun 10 peringkat jika dibandingkan pada tahun 2014 berada pada peringkat 106. Hal ini membuat Indonesia jauh tertinggal dengan negara-negara tetangga di Asia Tenggara, seperti Malaysia peringkat 60, Filipina peringkat 71, dan Brunei Darussalam peringkat 83. Pemeringkatan dilakukan berdasarkan *EGDI (E-government Development Index)* yang mengukur 3 subindex yaitu online service index, telecommunicaion index, dan human capital index. *EDGI (E-government Development Index)* mengukur kemampuan dan kapasitas instansi pemerintahan dalam menggunakan TI untuk menyediakan layanan publik. (United Nations, 2016).

Kabupaten Sidenreng Rappang telah mengadopsi inovasi teknologi dalam penerapan e-government sejak tahun 2016, ini terlihat dari kegiatan launching SI-IDA online (sistem informasi dan aduan online), website dan aplikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan sistem pemerintahannya. Untuk memperbaiki

pembangunan dan pengembangan teknologi informasi pada pemerintah daerah, syarat utama yang harus dilaksanakan ialah tersedianya sarana dan prasarana teknologi informasi dalam layanan operasionalnya, hanya saja tidak semua instansi menggunakan komputer dalam layanan operasionalnya, sebagian instansi menggunakan laptop pribadi untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk mendukung layanan operasionalnya.

Pengembangan infrastruktur teknologi informasi yang sepenuhnya belum mendukung dalam penerapan website yang direncanakan, baik yang diterapkan oleh pemerintah pusat sampai pada tingkat pemerintah daerah. Penerapan dan pengembangan e-government di tingkat pemerintah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang belum sepenuhnya terimplementasikan dengan baik, khususnya untuk situs website yang dimilikinya, sehingga ada beberapa faktor yang menjadi penyebab rendahnya respon dan partisipasi dalam pengelolaan situs website, antara lain :

1. Hanya ada beberapa instansi/dinas yang memiliki website dan juga berita atau pun informasinya tidak update, sehingga jumlah kunjungan masih sedikit.
2. Baik masyarakat, perusahaan dan pemerintah masih relatif sedikit yang mengakses website pemerintah daerah. Masyarakat bertujuan untuk mengetahui informasi pemerintah daerah, sedangkan perusahaan bertujuan untuk mengetahui peraturan pemerintah daerah.
3. Hanya sedikit masyarakat dan perusahaan yang pernah mengunjungi atau membuka website pemerintah daerah.

4. Perlu adanya sosialisasi website ditingkat pemerintah daerah, sehingga penggunaan website dapat terimplementasikan.

Berdasarkan obervasi yang dilakukan penulis pada beberapa website pemerintah daerah kabupaten Sidenreng Rappang, hampir seluruh situs website tidak dapat diakses, adapun hal tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.1. Website SKPD Kabupaten Sidenreng Rappang

Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sidrap	Website	Terakhir Update
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak	Tidak Tersedia	-
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tidak Tersedia	-
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	Tidak Tersedia	-
Dinas Komunikasi dan Informatika	http://dishub-sidrap.blogspot.co.id/	2011
Dinas Penanaman Modal dan PTSP	http://siidaperizinan.sidrapkab.go.id	2018
Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil	Tidak Tersedia	-
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Tidak Tersedia	-
Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	Tidak Tersedia	-
Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan	Tidak Tersedia	-
Dinas Polisi PP dan Pemadam Kebakaran	Tidak Tersedia	-
Dinas Perdagangan	Tidak Tersedia	-
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan pariwisata	Tidak Tersedia	-
Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	Tidak Tersedia	-
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Tidak Tersedia	-
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	Tidak Tersedia	-

Sumber: Penulis, (2018)

Dari tabel di atas dapat disimpulkan, bahwa dari beberapa dinas hanya ada 2 dinas yang memiliki website, dari 2 dinas tersebut terakhir tersedia antara tahun

2011 dan 2018 sedangkan dinas yang lainnya tidak tersedia. Ini menunjukkan bahwa banyaknya dinas yang ada belum sepenuhnya memahami manfaat dari pelayanan teknologi informasi dan komunikasi dalam penerapan e-government di tingkat daerah.

Penerapan aplikasi e-government di tingkat Pemerintah Daerah disesuaikan dengan aplikasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Sudah banyak aplikasi yang telah dibuat, baik untuk keperluan media sosial internet maupun untuk pelayanan publik, namun dalam pelayanannya masih banyak memiliki kekurangan, hal ini disebabkan pengembangan basis data dan aplikasinya berasal dari konsultan yang berbeda-beda. Maka antara basis data yang lainnya tidak memungkinkan untuk berkomunikasi. Saat ini yang banyak digunakan oleh Pemerintah Daerah atau dinas/badan di Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.2. Aplikasi SKPD Kabupaten Sidenreng Rappang

APLIKASI	KETERANGAN	TERAKHIR UPDATE
TEPRA	Tersedia	2018
E-MONEV	Tersedia	2018
SIMPEG	Tersedia	2018
LPSE	Tersedia	2018
BPS	Tersedia	2018
OJK	Tersedia	2018
SIRUP	Tersedia	2018
SIPPD	Tersedia	2018
SI-IDA	Tersedia	2018

Sumber: Penulis, (2018)

Tabel di atas menunjukkan bahwa, banyaknya aplikasi yang digunakan oleh Pemerintah Daerah, tidak sesuai dalam pelayanan e-governmentnya. Sehingga

perlu adanya pelatihan dan pengembangan dalam penerapan e-government ditingkat Pemerintah Daerah. Kompleksitas permasalahan tersebut di atas, merupakan fenomena umum yang terjadi hampir sebahagian besar di tingkat pemerintahan daerah. Berdasarkan dari penjelasan diatas maka penulis berkesimpulan untuk merencanakan penelitian dengan judul: ***“Adopsi Inovasi Teknologi Dalam Penerapan E-Government”***.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah dalam rancangan penelitian ini adalah seberapa jauh pengaruh adopsi inovasi teknologi dalam e-government di Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang ?

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk menjelaskan seberapa jauh pengaruh adopsi inovasi teknologi dalam e-government di Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat Akademik

1. Sebagai pendalaman kajian tentang dinamika adopsi teknologi informasi dalam e-government di Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang,

dalam upaya memperkaya dan menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu pemerintahan.

2. Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi peneliti selanjutnya, pegiat peneliti serta semua pihak yang tertarik dalam mengkaji dan mendalami tentang adopsi inovasi teknologi dalam e-government.

Manfaat Praktis

1. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi semua pihak yang terkait untuk mengetahui secara mendalam tentang adopsi inovasi teknologi dalam e-government di Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Dapat dijadikan pedoman atau acuan pemerintah dan semua pihak untuk memperbaiki adopsi inovasi teknologi dalam e-government di Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.